



SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BONE



RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA)

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas rumah tangga daerah yaitu penyusunan Rancangan Rencana Kerja (**RENJA**) Tahun 2022.

Rancangan Rencana Kerja tahun 2022 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2021 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bone selama tahun 2022.

Dalam Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Watampone, Juli 2021



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN

Pangkt. Pembina Utama Madya

NIP. 19671006 1993 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR GRAFIK..... iii

DAFTAR TABEL..... iv

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD..... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan sekretaris Daerah..... 23

2.3. Isu-isu Pentingnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten 33

2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 33

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 50

BAB III. HASIL EVALUASI DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 56

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasioanal 56

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 57

3.3. Program, Kegiatan & Sub Kegiatan..... 60

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 67

BAB V. PENUTUP 76

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018.....	8
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017-2020.....	24
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	34
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022	51
Tabel 3.1	Identifikasi Kebijakan Nasional.....	57
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Formasi Perhitungan.....	59
Tabel 3.3	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan.....	63
Tabel 4.1	Rencana Belanja Setda Kabupaten Bone Tahun 2022.....	67
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah, meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan menjabarkan rencana detail teknis pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja-SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Bone menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Renja-SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah karena Renja-SKPD merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang keuangan daerah.

Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja-SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja-SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja-SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis kedalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Bahwa penyusunan Renja-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Bone mengacu:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Renja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 Tentang Hasil Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Periode 2018-2023
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, antara lain:

a. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 adalah merupakan dokumen tahunan yang merupakan penjabaran dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dearah Tahun 2018-2023 dan hubungannya dengan RKPD Kabupaten Bone. Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah ini, adalah untuk mewujudkan sinergis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, dengan SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah, sbb:

- Memberi arah dan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf, agar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.
- Mewujudkan visi, misi Pemerintah Kabupaten Bone.
- Merumuskan Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone dalam menyusun program kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, yang dijabarkan dalam beberapa fungsi sebagai berikut :

- 1). Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah,
- 2). Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah,
- 3). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- 4). Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dari uraian tugas dan fungsi diatas, Nampak bahwa Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian visi **“Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”** yang dijabarkan dalam misi Bupati dan Wakil Bupati : ***“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)”*** dengan program strategis pemerintah daerah yaitu:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- c) Program Perekonomian dan Pembangunan

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2022 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Upaya perbaikan dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel T-C 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Tahun 2021

Sekretariat Daerah Kabupaten Bone

PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN I TAHUN 2021

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)	
											I		II		III		IV					
1					2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/6x100 %	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Bahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	56.574.496.885	100	43.645.178.981	22,25	7.054.124.794							22%	7.054.124.794	16,16	
4	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	855.827.000	100	655.000.000	50	165.347.600							50%	165.347.600	25,24	
4	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	5	453.097.000	7	300.000.000	4	68.723.300							4	68.723.300	22,91	23
4	01	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang Tersusun	2	45.320.000	2	40.000.000	1	-							1	-	50	-

4	01	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD Yang Tersusun	1	45.320.000	1	40.000.000	0	-						0	-	0	-
4	01	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD Yang Tersusun	1	51.500.000	1	45.000.000	1	40.417.000						1	40.417.000	100	90
4	01	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD Yang Tersusun	1	45.320.000	1	40.000.000	0	4.200.000						0	4.200.000	0	11
4	01	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	169.950.000	1	150.000.000	1	44.369.000						1	44.369.000	100	30
4	01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	45.320.000	1	40.000.000	0	7.638.300						0	7.638.300	0	19
4	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	18.098.851.885	100	15.743.178.981	22,49	2.157.441.827						22%	2.157.441.827	13,70	
4	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Iuran / Asuransi Bagi ASN Perangkat Daerah Per Bulan	12	16.296.141.785	12	14.383.178.981	3	1.880.875.277						3	1.880.875.277	25	13

4	01	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Honorarium ASN Perangkat Daerah Per Bulan	12	771.680.100	12	450.000.000	3	99.520.000						3	99.520.000	25	22
4	01	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ Yang Di Verifikasi Selama Setahun	144	283.250.000	144	250.000.000	36	47.903.850						36	47.903.850	25	19
4	01	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi Pada Instansi Terkait	72	226.600.000	72	200.000.000	12	30.521.200						12	30.521.200	16,67	15
4	01	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan perangkat Daerah Yang Tersusun	1	169.950.000	3	150.000.000	0	35.519.450						0	35.519.450	0	24
4	01	01	202	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa	3	56.650.000	3	50.000.000	1	14.704.400						1	14.704.400	33,33	29
4	01	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Se mester Perangkat Daerah Yang Tersusun	3	294.580.000	3	260.000.000	1	48.397.650						1	48.397.650	33,33	19
4	01	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	453.200.000	100	400.000.000	33,33	88.031.048						33%	88.031.048	22,01	
4	01	01	203	01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah Yang Tersusun	3	453.200.000	3	400.000.000	1	88.031.048						1	88.031.048	33,33	
4	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Adminstrasi Kepegawaian	100	84.975.000	100	75.000.000	0,00	-						0%	-	0,00	

						Perangkat Daerah															
4	01	01	205	06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15	84.975.000	14	75.000.000	0	-						0	-	0,00	
4	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	12.953.194.000	100	9.060.000.000	9,24	1.589.981.331						9%	1.589.981.331	17,55	
4	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	4	453.200.000	4	300.000.000	1	89.848.281						1	89.848.281	25,00	
4	01	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket penyediaan Alat tulis Kantor (ATK) Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Rencana Kebutuhan	5	331.994.000	5	260.000.000	1	99.411.600						1	99.411.600	20,00	
4	01	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	5	2.266.000.000	5	2.000.000.000	1	748.267.300						1	748.267.300	20,00	
4	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Kebutuhan	2	113.300.000	2	100.000.000	1	24.539.700						1	24.539.700	50,00	

4	01	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Pejabat Daerah Yang Di Fasilitasi	36	6.798.000.000	36	6.000.000.000	3	588.182.450						3	588.182.450	8,33	
4	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah yang diikuti oleh Aparat Perangkat Daerah	140	2.990.700.000	132	400.000.000	10	39.732.000						10	39.732.000	7,58	
4	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan	100	4.312.800.000	100	2.612.000.000	31,25	560.676.700						31%	560.676.700	21,47	
4	01	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Rencana Kebutuhan	Mobil 3	2.500.000.000	Mobil 2 dan Motor 6	1.000.000.000	0	-						0	-	0,00	
4	01	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebeluer Kantor Sesuai Rencana Kebutuhan	3	453.200.000	6	412.000.000	2	147.132.000						2	147.132.000	33,33	
4	01	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sesuai Rencana Kebutuhan	10	1.359.600.000	10	1.200.000.000	3	413.544.700						3	413.544.700	30,00	
4	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	3.208.850.000	100	2.100.000.000	23,28	412.075.267						23%	412.075.267	19,62	

4	01	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengadministrasian Surat Masuk dan Keluar yang di Kelola dan distribusikan	4000	226.600.000	4000	200.000.000	930	27.145.800						930	27.145.800	23,25	
4	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (Telepon/faximile, Internet dan tv) Sesuai Rencana Kebutuhan	24	283.250.000	24	250.000.000	6	36.681.028						6	36.681.028	25,00	
4	01	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Sesuia Rencana Kebutuhan	0	-	2	150.000.000	1	31.250.000						1	31.250.000	50,00	
4	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor Per Bulan	12	2.699.000.000	12	1.500.000.000	3	316.998.439						3	316.998.439	25,00	
4	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	5.590.119.000	100	4.570.000.000	19,48	682.465.269						19%	682.465.269	14,93	
4	01	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	13	1.699.500.000	13	1.500.000.000	4	248.622.193						4	248.622.193	30,77	
4	01	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	45	1.802.500.000	45	1.500.000.000	4	268.729.394						4	268.729.394	8,89	

					Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
4	01	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sesuai Rencana Kebutuhan	13	162.019.000	13	120.000.000	4	10.472.500						4	10.472.500	30,77	
4	01	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai rencana Kebutuhan	6	1.926.100.000	6	1.450.000.000	3	154.641.182						3	154.641.182	50,00	
4	01	01	211		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	3.455.650.000	100	3.050.000.000	13,73	278.589.652						14%	278.589.652	9,13	
4	01	01	211	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH Per Bulan	12	226.600.000	12	200.000.000	3	37.047.252						3	37.047.252	25,00	
4	01	01	211	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pasang Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya KDH dan WKDH	74	396.550.000	74	350.000.000	8	89.000.000						8	89.000.000	10,81	
4	01	01	211	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Medical Check Up Untuk KDH dan WKDH	4	226.600.000	4	200.000.000	0	2.542.400						0	2.542.400	0,00	
4	01	01	211	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala	Jumlah Realisasi Pembayaran Dana Penunjang	12	2.605.900.000	12	2.300.000.000	3	150.000.000						3	150.000.000	25,00	

					Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Operational KDH dan WKDH Per Bulan																
4	01	01	212		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100	2.039.400.000	100	1.800.000.000	25,00	535.747.000						25%	535.747.000	29,76		
4	01	01	212	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4	623.150.000	4	550.000.000	1	133.500.000						1	133.500.000	25,00		
4	01	01	212	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	4	453.200.000	4	400.000.000	1	99.500.000						1	99.500.000	25,00		
4	01	01	212	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	4	963.050.000	4	850.000.000	1	302.747.000						1	302.747.000	25,00		
4	01	01	213		Penataan Organisasi	Persentase Realisasi Penataan Administrasi Kelembagaan Pemda	100	2.761.630.000	100	1.450.000.000	14,29	348.433.700						14%	348.433.700	24,03		
4	01	01	213	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	255.380.000	2	200.000.000	0	19.763.700						0,15	19.763.700	7,70		
4	01	01	213	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3	879.250.000	4	425.000.000	1	62.501.700						1	62.501.700	25,00		

4	01	01	213	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	927.000.000	1	825.000.000	0	266.168.300						0,45	266.168.300	44,89	
4	01	01	213	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Kegiatan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	350.000.000		-	0	-						0	-	0,00	
4	01	01	213	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	350.000.000		-	0	-						0	-	0,00	
4	01	01	214		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	2.760.000.000	100	2.130.000.000	25,00	235.335.400						25%	235.335.400	11,05	
4	01	01	214	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan Keprotokolan	60	854.000.000	60	650.000.000	15	69.747.400						15	69.747.400	25,00	
4	01	01	214	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Pelayanan Komunikasi Pimpinan, Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan	20	941.000.000	20	730.000.000	3	6.497.000						3	6.497.000	15,00	
4	01	01	214	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Penyediaan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Yang Tersusun	12	965.000.000	12	750.000.000	5	159.091.000						5	159.091.000	41,67	

4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Persentase Ketersediaan Bahan Perumusan, Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas, Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Dibidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.</i>	100	17.284.117.000	100	15.178.660.500	11,56	630.191.850						12%	630.191.850	4,15	
4	01	02	201		Administrasi Tata Pemerintahan	<i>Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan</i>	100	1.393.260.000	100	1.200.000.000	27,27	267.007.500						27%	267.007.500	22,25	
4	01	02	201	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Administrasi Pemerintahan yang Tersusun	4	226.270.000	4	170.000.000	1	29.150.300						1	29.150.300	25,00	
4	01	02	201	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Administrasi Kewilayahan Yang Tersusun	3	453.200.000	3	400.000.000	0	17.217.800						0,3333	17.217.800	11,11	
4	01	02	201	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Otonomi Daerah Yang Tersusun	4	713.790.000	4	630.000.000	2	220.639.400						2	220.639.400	50,00	
4	01	02	202		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<i>Persentase Terlaksanannya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	100	13.206.262.000	100	11.945.160.500	0,11	95.094.600						0%	95.094.600	0,80	

4	01	02	202	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan	10	1.200.000.000	9	10.790.160.500	0	31.775.200						0,03	31.775.200	0,33	
						Jumlah Calon Jemaah Haji yang di Fasilitasi	100 0	1.156.262.000	900	900.000.000	0							0	-	0,00	
						Jumlah Dokumen Kegiatan Penyaluran Dana Hibah	1	10.350.000.000										0	-	0,00	
4	01	02	202	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kebijakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta capaian kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1	300.000.000	4	175.000.000	1	48.346.500						1	48.346.500	25,00	
4	01	02	202	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kebijakan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan serta Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	6	200.000.000	4	80.000.000	0	14.972.900						0,4	14.972.900	10,00	
4	01	02	203		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	100	1.948.595.000	100	1.533.500.000	2,22	171.820.700						2%	171.820.700	11,20	
4	01	02	203	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Forum Kajian Perundang - Undangan dan Produk Hukum Yang Tersusun	39	566.500.000	35	500.000.000	0	36.405.000						0	36.405.000	0,00	
4	01	02	203	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Renca Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	4	815.760.000	4	720.000.000	0	126.415.700						0,25	126.415.700	6,25	
						Jumlah Permasalahan Hukum Yang Terselesaikan	15		15		1							1	-	6,67	
4	01	02	203	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang -	1	550.000.000	1	300.000.000	1	9.000.000						1	9.000.000	100,00	

4	01	03	201	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Laporan Pembinaan BUMD dan BULD Yang Dilaksanakan	3	420.700.000	2	300.000.000	0	17.971.000						0,1	17.971.000	5,00	
4	01	03	201	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan TPID Yang Di Hasilkan	1	330.000.000	1	270.000.000	1	11.255.000						1	11.255.000	100,00	
						Jumlah Laporan Pengelolaan DBH-CHT	2	242.000.000	2	200.000.000	0							0	-	0,00	
4	01	03	201	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Laporan TPKAD yang Dihasilkan	4	520.000.000	4	385.000.000	1	23.937.200						1	23.937.200	25,00	
4	01	03	201	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Adminisrasi Penerapan BLUD Yang Diverifikasi	10	550.000.000	2	200.000.000	0	16.516.950						0,1	16.516.950	5,00	
4	01	03	202		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100	837.194.255	100	580.000.000	0,11	69.601.100						0%	69.601.100	12,00	
4	01	03	202	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Informasi Administrasi Pembangunan Daerah dan Realisasi Pembangunan	2	260.153.755	2	145.000.000	1	40.822.850						1	40.822.850	50,00	
4	01	03	202	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di Tahun Berjalan	1	264.500.000	1	235.000.000	0	9.907.200						0,25	9.907.200	25,00	

4	01	03	202	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah yang Bersumber dari (APBD Kab. APBD Prov, APBN dan DAK)	1	312.540.500	1	200.000.000	0	18.871.050						0,25	18.871.050	25,00	
4	01	03	203		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	70	1.375.400.000	50	1.040.000.000	20,90	58.131.078						21%	58.131.078	5,59	
4	01	03	203	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang terlaksana	600	317.400.000	550	240.000.000	64	3.393.300						64	3.393.300	11,64	
4	01	03	203	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah fasilitasi OPD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik	66	367.655.000	66	278.000.000	64	11.669.000						64	11.669.000	96,97	
4	01	03	203	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Kematangan UKPBJ	8	690.345.000	6	522.000.000	2	43.068.778						2	43.068.778	33,33	
4	01	03	204		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Ketersediaan Data Informasi Sumber Daya Alam	100	1.442.802.640	100	611.000.000	25	55.813.600						25%	55.813.600	9,13	
4	01	03	204	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Potensi Suber Daya Alam Di Kab. Bone	2	500.638.710	2	184.000.000	1	54.840.600						1	54.840.600	50,00	

4	01	03	204	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Monitoring Potensi Sumber Daya Alam di Kab. Bone	1	591.663.930	1	196.000.000	0	-						0	-	0,00	
4	01	03	204	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah koordinasi Antar Instansi Yang Terkait	4	250.500.000	4	156.000.000	1	973.000						1	973.000	25,00	
						Jumlah Laporan Pengelolaan DBH-CHT	1	100.000.000	1	75.000.000								0	-	0,00	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										62.409.839.481		7.937.542.572						16.62%	7.937.542.572	16.60%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah yaitu:

- a. Faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone antara lain:
 1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
 2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
 3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
 4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
- b. Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Bone adalah :
 1. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
 3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
 4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya misinterpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan. Adapun program dan kegiatan-kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bone diuraikan pada Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone sampai dengan 2020, target kinerja 2021 dan proyeksi sampai dengan 2022 dapat diuraikan dalam table berikut:

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022

NO	INDIKATOR SASARAN	SPM/ STANDAR NASIONAL	KODE KEGIATAN					NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH		REALISASI CAPAIAN TW. I	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
										TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	2	3	4					5	6	8	9	10	11	12	13
1	Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten		4	01	02	201	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Administrasi Pemerintahan yang Tersusun	4	4		4	4	B. Tapem
			4	01	02	201	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Administrasi Kewilayahan Yang Tersusun	3	3		3	3	B. Tapem
			4	01	02	201	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Otonomi Daerah Yang Tersusun	4	4		4	4	B. Tapem
			4	01	02	202	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan	9	8		8	10	B. Kesra
									Jumlah Calon Jemaah Haji yang di Fasilitasi	900	950		950	1000	
									Jumlah Dokumen Kegiatan Penyaluran Dana Hibah	-	1		1	1	
			4	01	02	202	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kebijakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta capaian kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	4	1		1	1	B. Kesra

			4	01	02	202	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kebijakan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan serta Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	4	5		5	6	B. Kesra
			4	01	02	203	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Forum Kajian Perundang - Undangan dan Produk Hukum Yang Tersusun	35	37		37	39	B. Hukum
			4	01	02	203	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Renca Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	4	4		4	4	B. Hukum
							Jumlah Permasalahan Hukum Yang terselesaikan		15	15		15	15		
			4	01	02	203	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	1	1		1	1	B. Hukum
							Jumlah Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Tersedia		35	37		37	39		
			4	01	02	204	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kegiatan Kerjasama antar Daerah dan Instansi Pemerintah (MOU/PKS)	7	7		7	7	B. Kerjasama
			4	01	02	204	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Luar Negeri (MOU/PKS)	10	10		10	10	B. Kerjasama
			4	01	02	204	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Kerjasama Daerah	1	1		1	1	B. Kerjasama
2	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten		4	01	01	213	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	2		2	2	B. Organisasi

			4	01	01	213	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	1		1	1	B. Organisasi
			4	01	01	213	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		2		2	2	B. Organisasi
3	Survey Kepuasan Masyarakat/I KM		4	01	01	213	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	4	4		3	3	B. Organisasi
			5	01	01	214	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Kegiatan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1		1	1	B. Organisasi
4	Tingkat Inflasi Daerah		4	01	03	201	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Laporan Pembinaan BUMD dan BULD Yang Dilaksanakan	2	3		3	3	B. Perekonomian
			4	01	03	201	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan TPID Yang Di Hasilkan	1	1		1	1	B. Perekonomian
									Jumlah Laporan Pengelolaan DBH-CHT	2	2		2	2	
			4	01	03	201	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Laporan TPKAD yang Dihasilkan	4	4		4	4	B. Perekonomian
			4	01	03	201	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Adminisrasi Penerapan BLUD Yang Diverifikasi	2	5		5	10	B. Perekonomian
			4	01	03	202	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Informasi Administrasi Pembangunan Daerah dan Realisasi Pembangunan	2	2		2	2	B. Adm. Pembangunan

			4	01	03	202	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di Tahun Berjalan	1	1		1	1	B. Adm. Pembangunan
			4	01	03	202	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah yang Bersumber dari (APBD Kab. APBD Prov, APBN dan DAK)	1	1		1	1	B. Adm. Pembangunan
			4	01	03	203	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang terlaksana	550	550		550	600	B. Pengadaan Barang dan Jasa
			4	01	03	203	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah fasilitasi OPD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik	66	66		66	66	B. Pengadaan Barang dan Jasa
			4	01	03	203	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Kematangan UKPBJ	6	7		7	8	B. Pengadaan Barang dan Jasa
			4	01	03	204	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Potensi Suber Daya Alam Di Kab. Bone	2	2		2	2	B. Sumber Daya Alam
			4	01	03	204	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Monitoring Potensi Sumber Daya Alam di Kab. Bone	1	1		1	1	B. Sumber Daya Alam
			4	01	03	204	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah koordinasi Antar Instansi Yang Terkait	4	4		4	4	B. Sumber Daya Alam
				Jumlah Laporan Pengelolaan DBH-CHT	1	1			1	1					
5	Nilai SAKIP oleh APIP		4	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Monitoring Pengembangan Kebijakan Pendidikan dan Pariwisata	7	5		5	5	B. Perencanaan dan Keuangan

			4	01	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Monitoring dan Pelaporan UKS di Kab. Bone	2	2		2	2	B. Perencanaan dan Keuangan
			4	01	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Jemaah yang Di Fasilitas dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji (Orang)	1	1		1	1	B. Perencanaan dan Keuangan
			4	01	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kehidupan Beragama	1	1		1	1	B. Perencanaan dan Keuangan
			4	01	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD Yang Tersusun	1	1		1	1	B. Perencanaan dan Keuangan
			4	01	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1		1	1	B. Perencanaan dan Keuangan
			4	01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	4		4	4	B. Perencanaan dan Keuangan
			4	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Iuran / Asuransi Bagi ASN Perangkat Daerah	12	12		12	12	B. Perencanaan dan Keuangan
			4	01	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Honorarium ASN Perangkat Daerah	12	12		12	12	B. Perencanaan dan Keuangan
			4	01	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ Yang Di Verifikasi Selama Setahun	144	144		144	144	B. Perencanaan dan Keuangan

			4	01	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi Pada Instansi Terkait	72	72		72	72	B. Perencanaan dan Keuangan
			4	01	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan perangkat Daerah Yang Tersusun	3	1		1	1	B. Perencanaan dan Keuangan
			4	01	01	202	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3	3		3	3	B. Perencanaan dan Keuangan
			4	01	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semester Perangkat Daerah Yang Tersusun	3	3		3	3	B. Perencanaan dan Keuangan
			4	01	01	203	01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah Yang Tersusun	3	3		3	3	B. Perencanaan dan Keuangan
			4	01	01	205	06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14	15		15	15	B. Umum
			4	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	4		4	4	B. Umum
			4	01	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket penyediaan Alat tulis Kantor (ATK) Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Rencana Kebutuhan	5	5		5	5	B. Umum
			4	01	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	5	5		5	5	B. Umum

			4	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Kebutuhan	2	2		2	2	B. Umum
			4	01	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Pejabat Daerah Yang Di Fasilitasi	36	36		36	36	B. Umum
			4	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah yang diikuti oleh Aparat Perangkat Daerah	132	135		135	140	B. Umum
			4	01	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Rencana Kebutuhan	Mobil 2 dan Motor 6	Mobil 2		Mobil 2	Mobil 3	B. Umum
			4	01	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebeluer Kantor Sesuai Rencana Kebutuhan	6	3		3	3	B. Umum
			4	01	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sesuai Rencana Kebutuhan	10	6		6	10	B. Umum
			4	01	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengadministrasian Surat Masuk dan Keluar yang di Kelola dan distribusikan	4000	4000		4000	4000	B. Umum
			4	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (Telepon/faximile, Internet dan tv) Sesuai Rencana Kebutuhan	24	24		24	24	B. Umum
			4	01	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Sesuia Rencana Kebutuhan	2	2		2	0	B. Umum

			4	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Tenaga Administrasi Dan Jasa Pembersihan Kantor	108	108		108	108	B. Umum
			4	01	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	13	13		13	13	B. Umum
			4	01	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	45	45		45	45	B. Umum
			4	01	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sesuai Rencana Kebutuhan	13	13		13	13	B. Umum
			4	01	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai rencana Kebutuhan	6	6		6	6	B. Umum
			4	01	01	211	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH Per Bulan	12	12		12	12	B. Umum
			4	01	01	211	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pasang Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya KDH dan WKDH	74	74		74	74	B. Umum
			4	01	01	211	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Medical Check Up Untuk KDH dan WKDH	4	4		4	4	B. Umum

			4	01	01	211	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Realisasi Pembayaran Dana Penunjang Operational KDH dan WKDH Per Bulan	12	12		12	12	B. Umum
			4	01	01	212	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4	4		4	4	B. Umum
			4	01	01	212	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	4	4		4	4	B. Umum
			4	01	01	212	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	4	4		4	4	B. Umum
			4	01	01	214	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan Keprotokolan	60	60		60	60	B. Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			4	01	01	214	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Pelayanan Komunikasi Pimpinan, Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan	20	20		20	20	B. Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			4	01	01	214	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Penyediaan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Yang Tersusun	12	12		12	12	B. Protokol dan Komunikasi Pimpinan

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone

Isu–isu atau permasalahan–permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone beserta faktor– factor yang mempengaruhinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum tertatanya manajemen aset daerah
2. Belum optimalnya layanan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, dan bermutu
3. Belum sepenuhnya laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP)
4. Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan
5. Belum optimalnya pemahaman aparatur dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan tersebut terjadi karena faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Tagihan penjualan angsuran atas ruko, toko, kios dan lods Pasar Sentral Palakka Watampone belum didukung dengan bukti perikatan, dan pembelian yang telah lunas belum diproses bukti kepemilikannya
2. Sekitar 70% aset pmda belum tersertifikat dan ada beberapa yang belum teridentifikasi serta beberapa aset dikuasai oleh pihak yang tidak berhak
3. Masih terbatasnya SDM yang berlatar belakang pendidikan tentang pengelolaan keuangan
4. Penatausahaan keuangan pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang belum tertib sepenuhnya
5. Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) tidak tertib
6. Masih terbatasnya SDM dalam penguasaan perkembangan peraturan perundang-undangan dan teknologi informasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda. Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Nama Perangkat Daerah :
SEKRETARIAT DAERAH

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
	SEKRETARIAT DAERAH				45.623.188.920					40.270.274.320	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	T.R. Barat	Persentase Ketersediaan Bahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		32.835.867.070	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	T.R. Barat	Persentase Ketersediaan Bahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		28.877.859.720	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	T.R. Barat	<i>Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100	533.054.300	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	T.R. Barat	<i>Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100	533.054.300	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7	247.744.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	5	247.744.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang Tersusun	2	26.760.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang Tersusun	2	26.760.000	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD Yang Tersusun	1	22.074.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD Yang Tersusun	1	22.074.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen DPA SKPD Yang Tersusun	1	26.760.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen DPA SKPD Yang Tersusun	1	26.760.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD Yang Tersusun	1	22.067.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD Yang Tersusun	1	22.067.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	149.450.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	149.450.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	38.199.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	38.199.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	T.R. Barat	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.407.964.141	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	T.R. Barat	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	12.997.653.290	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	T.R. Barat	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Iuran / Asuransi Bagi ASN Perangkat Daerah	107	12.293.640.651	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	T.R. Barat	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Iuran / Asuransi Bagi ASN Perangkat Daerah	12	11.883.329.800	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	T.R. Barat	Jumlah Realisasi Pembayaran Honorarium ASN Perangkat Daerah	60	681.094.500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	T.R. Barat	Jumlah Realisasi Pembayaran Honorarium ASN Perangkat Daerah	12	681.094.500	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen SPJ Yang Di Verifikasi Selama Setahun	144	114.610.490	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen SPJ Yang Di Verifikasi Selama Setahun	144	114.610.490	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	T.R. Barat	Jumlah Koordinasi Pada Instansi Terkait	30	139.640.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	T.R. Barat	Jumlah Koordinasi Pada Instansi Terkait	72	139.640.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan perangkat Daerah Yang Tersusun	1	41.480.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan perangkat Daerah Yang Tersusun	1	41.480.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	T.R. Barat	Jumlah Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa	4	40.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	T.R. Barat	Jumlah Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa	3	40.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester Perangkat Daerah Yang Tersusun	T.R. Barat	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semester Perangkat Daerah Yang Tersusun	3	97.498.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester Perangkat Daerah Yang Tersusun	T.R. Barat	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semester Perangkat Daerah Yang Tersusun	3	97.498.500	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	T.R. Barat	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	422.302.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	T.R. Barat	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	422.302.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah Yang Tersusun	3	422.302.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah Yang Tersusun	3	422.302.000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	T.R. Barat	Persentase Pelaksanaan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	74.250.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	T.R. Barat	Persentase Pelaksanaan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		22.125.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	T.R. Barat	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	74.250.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	T.R. Barat	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	22.125.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	T.R. Barat	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	7.053.349.870	Administrasi Umum Perangkat Daerah	T.R. Barat	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	4.882.023.970	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	T.R. Barat	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	1	289.637.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	T.R. Barat	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	4	187.237.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	T.R. Barat	Jumlah Paket penyediaan Alat tulis Kantor (ATK) Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Rencana Kebutuhan	3	244.054.870	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	T.R. Barat	Jumlah Paket penyediaan Alat tulis Kantor (ATK) Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Rencana Kebutuhan	5	87.001.970	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	T.R. Barat	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	5	1.792.230.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	T.R. Barat	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	5	1.051.760.000	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	T.R. Barat	jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Kebutuhan	2	80.901.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	T.R. Barat	jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Kebutuhan	2	80.901.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	T.R. Barat	Jumlah Kunjungan Tamu Pejabat Daerah Yang Di Fasilitasi	24	1.955.895.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	T.R. Barat	Jumlah Kunjungan Tamu Pejabat Daerah Yang Di Fasilitasi	36	1.361.340.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	T.R. Barat	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah yang diikuti oleh Aparat Perangkat Daerah	32	2.690.632.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	T.R. Barat	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah yang diikuti oleh Aparat Perangkat Daerah	135	2.113.784.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	T.R. Barat	Persentase Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan	100	304.635.440	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	T.R. Barat	Persentase Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan	100	42.944.950	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	T.R. Barat	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Rencana Kebutuhan	0	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	T.R. Barat	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Rencana Kebutuhan	0	-	
	Pengadaan Mebel	T.R. Barat	Jumlah Paket Pengadaan Mebeluer Kantor Sesuai Rencana Kebutuhan	3	119.421.000	Pengadaan Mebel	T.R. Barat	Jumlah Paket Pengadaan Mebeluer Kantor Sesuai Rencana Kebutuhan	2	19.996.000	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	T.R. Barat	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sesuai Rencana Kebutuhan	5	185.214.440	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	T.R. Barat	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sesuai Rencana Kebutuhan	6	22.948.950	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	T.R. Barat	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	2.716.610.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	T.R. Barat	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	2.683.278.660	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	T.R. Barat	Jumlah Pengadministrasian Surat Masuk dan Keluar yang di Kelola dan distribusikan	4000	93.658.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	T.R. Barat	Jumlah Pengadministrasian Surat Masuk dan Keluar yang di Kelola dan distribusikan	4000	72.325.860	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	T.R. Barat	Jumlah Paket Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (Telepon/faximile, Internet dan tv) Sesuai Rencana Kebutuhan	24	211.770.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	T.R. Barat	Jumlah Paket Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (Telepon/faximile, Internet dan tv) Sesuai Rencana Kebutuhan	24	211.770.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	T.R. Barat	Jumlah Paket Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Sesuia Rencana Kebutuhan	0	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	T.R. Barat	Jumlah Paket Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Sesuia Rencana Kebutuhan	0	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	T.R. Barat	Jumlah Pembayaran Tenaga Administrasi Dan Jasa Pembersihan Kantor	108	2.411.182.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	T.R. Barat	Jumlah Pembayaran Tenaga Administrasi Dan Jasa Pembersihan Kantor	108	2.399.182.800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	T.R. Barat	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	3.124.491.289	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	T.R. Barat	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100	2.583.583.885	

								Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	T.R. Barat	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	13	993.424.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	T.R. Barat	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	13	958.080.750	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	T.R. Barat	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	41	1.131.294.010	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	T.R. Barat	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	45	971.194.460	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	T.R. Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sesuai Rencana Kebutuhan	13	155.900.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	T.R. Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sesuai Rencana Kebutuhan	13	108.900.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	T.R. Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai rencana Kebutuhan	6	843.872.979	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	T.R. Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai rencana Kebutuhan	6	545.408.675	

	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	T.R. Barat	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	1.557.603.440	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	T.R. Barat	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	1.309.877.875	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	T.R. Barat	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH Per Bulan	2	181.103.440	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	T.R. Barat	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH Per Bulan	12	181.103.440	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	T.R. Barat	Jumlah Pasang Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya KDH dan WKDH	10	261.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	T.R. Barat	Jumlah Pasang Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya KDH dan WKDH	74	184.000.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	T.R. Barat	Jumlah Paket Medical Check Up Untuk KDH dan WKDH	2	181.500.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	T.R. Barat	Jumlah Paket Medical Check Up Untuk KDH dan WKDH	4	145.700.000	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	T.R. Barat	Jumlah Realisasi Pembayaran Dana Penunjang Operational KDH dan WKDH Per Bulan	2	934.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	T.R. Barat	Jumlah Realisasi Pembayaran Dana Penunjang Operational KDH dan WKDH Per Bulan	12	799.074.435	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	T.R. Barat	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100	1.266.000.000	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	T.R. Barat	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100	1.275.410.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	T.R. Barat	Jumlah Paket Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4	534.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	T.R. Barat	Jumlah Paket Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala	4	534.000.000	

								Daerah			
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	T.R. Barat	Jumlah Paket Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	4	396.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	T.R. Barat	Jumlah Paket Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	4	405.410.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	T.R. Barat	Jumlah Paket Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	4	336.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	T.R. Barat	Jumlah Paket Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	4	336.000.000	
	Penataan Organisasi	T.R. Barat	Persentase Realisasi Penataan Administrasi Kelembagaan Pemda	100	1.322.972.040	Penataan Organisasi	T.R. Barat	Persentase Realisasi Penataan Administrasi Kelembagaan Pemda	100	1.122.972.040	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	168.798.890	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	165.338.890	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	T.R. Barat	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	4	608.125.150	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	T.R. Barat	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3	375.838.050	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	T.R. Barat	Jumlah Perangkat Daerah Yang Masuk Dalam Area Perubahan	30	546.048.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	121.661.150	

	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	T.R. Barat	Jumlah Kegiatan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0	-	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	T.R. Barat	Jumlah Kegiatan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	109.247.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	0	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	350.886.850	
	<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	<i>T.R. Barat</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	100	1.052.633.750	<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	<i>T.R. Barat</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>		1.002.633.750	
	Fasilitasi Keprotokolan	T.R. Barat	Jumlah Kegiatan Keprotokolan	60	482.140.000	Fasilitasi Keprotokolan	T.R. Barat	Jumlah Kegiatan Keprotokolan		432.140.000	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	T.R. Barat	Jumlah Pelayanan Komunikasi Pimpinan, Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan	20	112.727.750	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	T.R. Barat	Jumlah Pelayanan Komunikasi Pimpinan, Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan		112.727.750	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	T.R. Barat	Jumlah Penyediaan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Yang Tersusun	12	457.766.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	T.R. Barat	Jumlah Penyediaan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Yang Tersusun		457.766.000	

	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	T.R. Barat	Persentase Ketersediaan Bahan Perumusan, Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas, Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Dibidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.	100	10.405.899.050	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	T.R. Barat	Persentase Ketersediaan Bahan Perumusan, Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas, Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Dibidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.	100	9.273.494.400	
	<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>	<i>T.R. Barat</i>	<i>Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan</i>	<i>100</i>	<i>801.084.800</i>	<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>	<i>T.R. Barat</i>	<i>Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan</i>	<i>100</i>	<i>751.084.800</i>	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Administrasi Pemerintahan yang Tersusun	4	121.784.800	Penataan Administrasi Pemerintahan	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Administrasi Pemerintahan yang Tersusun	4	121.784.800	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Administrasi Kewilayahan Yang Tersusun	3	314.000.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Administrasi Kewilayahan Yang Tersusun	3	264.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Otonomi Daerah Yang Tersusun	4	365.300.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Otonomi Daerah Yang Tersusun	4	365.300.000	

	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	T.R. Barat	Persentase Terlaksanannya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	7.770.000.190	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	T.R. Barat	Persentase Terlaksanannya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	6.819.679.400	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	T.R. Barat	Jumlah Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan	10	7.556.500.190	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	T.R. Barat	Jumlah Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan	8	6.606.179.400	
								Jumlah Calon Jemaah Haji yang di Fasilitasi	950		
								Jumlah Dokumen Kegiatan Penyaluran Dana Hibah	1		
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	T.R. Barat	Jumlah Kebijakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta capaian kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	27	126.830.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	T.R. Barat	Jumlah Kebijakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta capaian kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1	126.830.000	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	T.R. Barat	Jumlah Kebijakan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan serta Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	27	86.670.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	T.R. Barat	Jumlah Kebijakan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan serta Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	5	86.670.000	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	T.R. Barat	Persentase Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	100	1.385.938.710	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	T.R. Barat	Persentase Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	100	1.295.554.850	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	T.R. Barat	Jumlah Forum Kajian Perundang - Undangan dan Produk Hukum Yang Tersusun	30 dan 5	463.162.560	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	T.R. Barat	Jumlah Forum Kajian Perundang - Undangan dan Produk Hukum Yang Tersusun	37	393.911.550	

	Fasilitasi Bantuan Hukum	T.R. Barat	Jumlah Renca Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	4	525.455.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	T.R. Barat	Jumlah Renca Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	4	670.308.700	
			Jumlah Permasalahan Hukum Yang terselesaikan	25				Jumlah Permasalahan Hukum Yang terselesaikan	15		
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	T.R. Barat	Jumlah Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	1	397.321.150	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	T.R. Barat	Jumlah Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	1	231.334.600	
								Jumlah Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Tersedia	37		
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	T.R. Barat	Persentase Perjanjian Kerjasama Daerah Yang Terlaksana	100	448.875.350	Fasilitasi Kerjasama Daerah	T.R. Barat	Persentase Perjanjian Kerjasama Daerah Yang Terlaksana	100	407.175.350	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	T.R. Barat	Jumlah Kegiatan Kerjasama antar Daerah dan Instansi Pemerintah (MOU/PKS)	7	162.738.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	T.R. Barat	Jumlah Kegiatan Kerjasama antar Daerah dan Instansi Pemerintah (MOU/PKS)	7	142.518.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	T.R. Barat	Jumlah Kegiatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Luar Negeri (MOU/PKS)	10	157.558.000	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	T.R. Barat	Jumlah Kegiatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Luar Negeri (MOU/PKS)	10	138.658.000	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Kerjasama Daerah	1	128.579.350	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Kerjasama Daerah	1	125.999.350	

	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	T.R. Barat	Persentase Ketersediaan Bahan Perumusan Pengoordinasi Pelaksanaan Tugas, Pemantauan dan Evaluai Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan.	100	2.381.422.800	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	T.R. Barat	Persentase Ketersediaan Bahan Perumusan Pengoordinasi Pelaksanaan Tugas, Pemantauan dan Evaluai Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan.	100	2.118.920.200	
	<i>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	<i>T.R. Barat</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	<i>100</i>	<i>783.724.600</i>	<i>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	<i>T.R. Barat</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	<i>100</i>	<i>684.074.600</i>	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	T.R. Barat	Jumlah Laporan Pembinaan BUMD dan BULD Yang Dilaksanakan	3	117.111.760	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	T.R. Barat	Jumlah Laporan Pembinaan BUMD dan BULD Yang Dilaksanakan	3	100.000.000	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	T.R. Barat	Jumlah Laporan TPID Yang Di Hasilkan	1	263.527.650	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	T.R. Barat	Jumlah Laporan TPID Yang Di Hasilkan	1	245.096.200	
			Jumlah Laporan Pengelolaan DBH-CHT	2				Jumlah Laporan Pengelolaan DBH-CHT	2		
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	T.R. Barat	Jumlah Laporan TPKAD yang Dihasilkan	4	165.985.990	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	T.R. Barat	Jumlah Laporan TPKAD yang Dihasilkan	4	138.978.400	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Adminisrasi Penerapan BLUD Yang Diverifikasi	5	237.099.200	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Adminisrasi Penerapan BLUD Yang Diverifikasi	5	200.000.000	

	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	T.R. Barat	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100	487.687.600	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	T.R. Barat	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100	374.878.400	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Informasi Administrasi Pembangunan Daerah dan Realisasi Pembangunan	2	120.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Informasi Administrasi Pembangunan Daerah dan Realisasi Pembangunan	2	104.000.000	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di Tahun Berjalan	1	239.836.500	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di Tahun Berjalan	1	159.200.000	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah yang Bersumber dari (APBD Kab. APBD Prov, APBN dan DAK)	1	127.851.100	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah yang Bersumber dari (APBD Kab. APBD Prov, APBN dan DAK)	1	111.678.400	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	T.R. Barat	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	60	662.220.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	T.R. Barat	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	60	662.176.700	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	T.R. Barat	Jumlah paket pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang terlaksana	500	186.400.400	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	T.R. Barat	Jumlah paket pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang terlaksana	550	186.400.400	

	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	T.R. Barat	Jumlah Paket Layanan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik	500	184.505.700	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	T.R. Barat	Jumlah fasilitasi OPD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik	66	184.505.700	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	T.R. Barat	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	291.313.900	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Kematangan UKPBJ	7	291.270.600	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	T.R. Barat	Persentase Ketersediaan Data Informasi Sumber Daya Alam	100	447.790.600	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	T.R. Barat	Persentase Ketersediaan Data Informasi Sumber Daya Alam		397.790.500	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Potensi Suber Daya Alam Di Kab. Bone	2	170.380.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Potensi Suber Daya Alam Di Kab. Bone	2	147.733.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Monitoring Potensi Sumber Daya Alam di Kab. Bone	1	97.877.800	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Monitoring Potensi Sumber Daya Alam di Kab. Bone	1	83.837.300	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	T.R. Barat	Jumlah koordinasi Antar Instansi Yang Terkait	4	179.532.800	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	T.R. Barat	Jumlah koordinasi Antar Instansi Yang Terkait	4	166.220.200	
								Jumlah Laporan Pengelolaan DBH-CHT	1		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 55 tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi Sekretariat Daerah, merupakan unsur Staff yang di pimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative.

Dalam perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan tahun 2022 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas, adapun usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah :
SEKRETARIAT DAERAH

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	T.R. Barat	Persentase Ketersediaan Bahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	T.R. Barat	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	5	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang Tersusun	2	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD Yang Tersusun	1	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen DPA SKPD Yang Tersusun	1	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD Yang Tersusun	1	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	T.R. Barat	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	T.R. Barat	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Iuran / Asuransi Bagi ASN Perangkat Daerah	12	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	T.R. Barat	Jumlah Realisasi Pembayaran Honorarium ASN Perangkat Daerah	12	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen SPJ Yang Di Verifikasi Selama Setahun	144	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	T.R. Barat	Jumlah Koordinasi Pada Instansi Terkait	72	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan perangkat Daerah Yang Tersusun	1	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	T.R. Barat	Jumlah Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa	3	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	T.R. Barat	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semester Perangkat Daerah Yang Tersusun	3	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	T.R. Barat	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah Yang Tersusun	3	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	T.R. Barat	Persentase Pelaksanaan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	T.R. Barat	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	T.R. Barat	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	T.R. Barat	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	4	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	T.R. Barat	Jumlah Paket penyediaan Alat tulis Kantor (ATK) Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Rencana Kebutuhan	5	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	T.R. Barat	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	5	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	T.R. Barat	jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Kebutuhan	2	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	T.R. Barat	Jumlah Kunjungan Tamu Pejabat Daerah Yang Di Fasilitasi	36	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	T.R. Barat	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah yang diikuti oleh Aparat Perangkat Daerah	135	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	T.R. Barat	Persentase Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan	100	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	T.R. Barat	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Rencana Kebutuhan	Mobil 2	
Pengadaan Mebel	T.R. Barat	Jumlah Paket Pengadaan Mebeluer Kantor Sesuai Rencana Kebutuhan	3	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	T.R. Barat	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sesuai Rencana Kebutuhan	6	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	T.R. Barat	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	T.R. Barat	Jumlah Pengadministrasian Surat Masuk dan Keluar yang di Kelola dan distribusikan	4000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	T.R. Barat	Jumlah Paket Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (Telepon/faximile, Internet dan tv) Sesuai Rencana Kebutuhan	24	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	T.R. Barat	Jumlah Paket Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Sesuia Rencana Kebutuhan	0	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	T.R. Barat	Jumlah Pembayaran Tenaga Administrasi Dan Jasa Pembersihan Kantor	108	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	T.R. Barat	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	T.R. Barat	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	13	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	T.R. Barat	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	45	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	T.R. Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sesuai Rencana Kebutuhan	13	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	T.R. Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai rencana Kebutuhan	6	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	T.R. Barat	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	T.R. Barat	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH Per Bulan	12	

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	T.R. Barat	Jumlah Pasang Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya KDH dan WKDH	74	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	T.R. Barat	Jumlah Paket Medical Check Up Untuk KDH dan WKDH	4	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	T.R. Barat	Jumlah Realisasi Pembayaran Dana Penunjang Operational KDH dan WKDH Per Bulan	12	
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	T.R. Barat	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	T.R. Barat	Jumlah Paket Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	T.R. Barat	Jumlah Paket Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	4	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	T.R. Barat	Jumlah Paket Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	4	
Penataan Organisasi	T.R. Barat	Persentase Realisasi Penataan Administrasi Kelembagaan Pemda	100	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	T.R. Barat	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	T.R. Barat	Jumlah Kegiatan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	T.R. Barat	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	
Fasilitasi Keprotokolan	T.R. Barat	Jumlah Kegiatan Keprotokolan	60	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	T.R. Barat	Jumlah Pelayanan Komunikasi Pimpinan, Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan	20	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	T.R. Barat	Jumlah Penyediaan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Yang Tersusun	12	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	T.R. Barat	Persentase Ketersediaan Bahan Perumusan, Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas, Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Dibidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.	100	
Administrasi Tata Pemerintahan	T.R. Barat	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	100	
Penataan Administrasi Pemerintahan	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Administrasi Pemerintahan yang Tersusun	4	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Administrasi Kewilayahan Yang Tersusun	3	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Otonomi Daerah Yang Tersusun	4	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	T.R. Barat	Persentase Terlaksanannya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	T.R. Barat	Jumlah Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan	8	
		Jumlah Calon Jemaah Haji yang di Fasilitasi	950	
		Jumlah Dokumen Kegiatan Penyaluran Dana Hibah	1	

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	T.R. Barat	Jumlah Kebijakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta capaian kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	T.R. Barat	Jumlah Kebijakan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan serta Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	5	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	T.R. Barat	Persentase Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	100	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	T.R. Barat	Jumlah Forum Kajian Perundang - Undangan dan Produk Hukum Yang Tersusun	37	
Fasilitasi Bantuan Hukum	T.R. Barat	Jumlah Renca Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	4	
		Jumlah Permasalahan Hukum Yang Terselesaikan	15	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	T.R. Barat	Jumlah Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	1	
		Jumlah Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Tersedia	37	
Fasilitasi Kerjasama Daerah	T.R. Barat	Persentase Perjanjian Kerjasama Daerah Yang Terlaksana	100	
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	T.R. Barat	Jumlah Kegiatan Kerjasama antar Daerah dan Instansi Pemerintah (MOU/PKS)	7	
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	T.R. Barat	Jumlah Kegiatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Luar Negeri (MOU/PKS)	10	
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Kerjasama Daerah	1	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	T.R. Barat	Persentase Ketersediaan Bahan Perumusan Pengoordinasi Pelaksanaan Tugas, Pemantauan dan Evaluai Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan.	100	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	T.R. Barat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	T.R. Barat	Jumlah Laporan Pembinaan BUMD dan BULD Yang Dilaksanakan	3	
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	T.R. Barat	Jumlah Laporan TPID Yang Di Hasilkan	1	
		Jumlah Laporan Pengelolaan DBH-CHT	2	
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	T.R. Barat	Jumlah Laporan TPKAD yang Dihasilkan	4	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Adminisrasi Penerapan BLUD Yang Diverifikasi	5	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	T.R. Barat	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Informasi Administrasi Pembangunan Daerah dan Realisasi Pembangunan	2	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di Tahun Berjalan	1	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah yang Bersumber dari (APBD Kab. APBD Prov, APBN dan DAK)	1	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	T.R. Barat	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	60	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	T.R. Barat	Jumlah paket pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang terlaksana	550	
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	T.R. Barat	Jumlah fasilitasi OPD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa	66	

		secara elektronik		
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Kematangan UKPBJ	7	
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	T.R. Barat	Persentase Ketersediaan Data Informasi Sumber Daya Alam	100	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Potensi Suber Daya Alam Di Kab. Bone	2	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	T.R. Barat	Jumlah Dokumen Monitoring Potensi Sumber Daya Alam di Kab. Bone	1	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	T.R. Barat	Jumlah koordinasi Antar Instansi Yang Terkait	4	
		Jumlah Laporan Pengelolaan DBH-CHT	1	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil consensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah pemerintahan daerah diseluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut perlu danya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Bone menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Propenas dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, masing-masing Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan pembangunan daerah. Untuk program kegiatan di daerah terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi terhadap kebijakan nasional, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	APBN	
2	Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah	APBN	
3	Kapasitas Keuangan Daerah	APBN	
4	Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	APBN	

Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, maka dalam menyusun program kegiatannya mengacu pada kebijakan nasional “Kapasitas Keuangan Daerah”, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja-SETDA pada tahun- tahun sebelumnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan sekretariat daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain:

TUJUAN :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Daerah Serta Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.

SASARAN :

- Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Profesional.
- Sasaran 2 : Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Daerah.
- Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah.

Tabel. 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Formasi Perhitungan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas tata kelola Sekretariat Daerah serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Profesional	Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten	Hasil Penilaian LPPD oleh Kemetrian Dalam Negri	Dok. Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan
			Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Hasil Evaluasi Penilaian SAKIP oleh KemenpanRB/Tim	Dok. Hasil Evaluasi/ Penilaian SAKIP	Bagian Organisasi
			Survey Kepuasan Masyarakat/IKM	Nilai Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Kab. Bone	Dok. Hasil Survey SKM pada Perangkat Daerah	Bagian Organisasi
		Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi Daerah	Hasil Survey BPS Kab. Bone	Dok. BPS, Bagian SDA dan Bagian Ekonomi Kab. Bone	Bagian Ekonomi & Bagian SDA
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Oleh APIP	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	Dok. Hasil Evaluasi/ Penilaian SAKIP	Bagian Keuangan dan Bagian Umum

3.3 Program, Kegiatan & Sub Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja SETDA Kabupaten Bone. Sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (dalam hal ini SETDA) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka SETDA Kabupaten Bone dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan penggerakan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Adapun kegiatannya sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
10. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
11. Penataan Organisasi
12. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
13. Administrasi Tata Pemerintahan

14. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
15. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
16. Fasilitasi Kerjasama Daerah
17. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
18. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
19. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
20. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Adapun

Sub Keegiatannya meliputi :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
10. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
13. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
14. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
15. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
16. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
17. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
21. Fasilitasi Kunjungan Tamu
22. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
23. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24. Pengadaan Mebel
25. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
26. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
27. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
28. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
29. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
30. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
31. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
32. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
33. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

34. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 35. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 36. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 37. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 38. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 39. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 40. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
 41. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 42. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 43. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 44. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 45. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
 46. Fasilitasi Keprotokolan
 47. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 48. Pendokumentasian Tugas Pimpinan
 49. Penataan Administrasi Pemerintahan
 50. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 51. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
 52. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 53. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
 54. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
 55. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 56. Fasilitasi Bantuan Hukum
 57. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
 58. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
 59. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
 60. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
 61. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 62. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 63. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
 64. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD
 65. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 66. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 67. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
 68. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 69. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
 70. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 71. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 72. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 73. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
- Dari keseluruhan alokasi anggaran Belanja Langsung dapat dilihat pada table 3.3

Tabel 3.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				20	Fasilitasi Kunjungan Tamu

		21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		23	Pengadaan Mebel
		24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		27	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	33	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		34	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		35	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		36	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	37	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
		38	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
		39	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

		11	Penataan Organisasi	40	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
				41	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				42	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
				43	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				44	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
		12	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	45	Fasilitasi Keprotokolan
				46	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
				47	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	13	Administrasi Tata Pemerintahan	48	Penataan Administrasi Pemerintahan
				49	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
				50	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
		14	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	51	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
				52	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
				53	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
		15	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	54	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
				55	Fasilitasi Bantuan Hukum
				56	Pendokumentasian Produk Hukum dan
				57	Pengelolaan Informasi Hukum
		16	Fasilitasi Kerjasama Daerah	58	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
				59	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
				60	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	17	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	61	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
				62	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

				63	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
				64	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD
		18	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	65	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		19	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	66	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
				67	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
				68	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
				69	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
				70	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		20	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	71	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
				72	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
				73	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kebijakan umum sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih yang selanjutnya ditentukan program pembangunan daerah dan ditetapkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan atas pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam rangka mencapai visi jangka menengah Kabupaten Bone. Rencana kerja dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan unit kerja. Secara keseluruhan rencana kerja dan alokasi anggaran untuk program kegiatan SETDA Kabupaten Bone pada Tahun Anggaran 2022 mengajukan usulan anggaran sebesar **Rp. 45.623.188.920,00** terdiri dari:

- 1. Belanja Operasi, sebesar **Rp. 45.260.946.000,00** dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS SETDA, tunjangan daerah dan iuran Askes PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
- 2. Belanja Modal sebesar **Rp. 362.242.920,00**

Tabel.4.1
Rencana Belanja SETDA Kab. Bone Tahun 2022

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)	%
1	Belanja Operasi	45.260.946.000,00	25
2	Belanja Modal	362.242.920,00	75
	JUMLAH	45.623.188.920,00	100

Tabel T-C.33.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023**

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					SEKRETARIAT DAERAH				40.270.274.320				74.688.376.136
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Bahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	T.R. Barat	100	28.877.859.720			100	52.989.915.785
4	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	T.R. Barat	100	533.054.300			100	742.630.000
4	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	T.R. Barat	5	247.744.300	DAU		5	339.900.000
4	01	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang Tersusun	T.R. Barat	2	26.760.000	DAU		2	45.320.000
4	01	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD Yang Tersusun	T.R. Barat	1	22.074.000	DAU		1	45.320.000
4	01	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD Yang Tersusun	T.R. Barat	1	26.760.000	DAU		1	51.500.000
4	01	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD Yang Tersusun	T.R. Barat	1	22.067.000	DAU		1	45.320.000
4	01	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	T.R. Barat	1	149.450.000	DAU		1	169.950.000
4	01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	T.R. Barat	4	38.199.000	DAU		4	45.320.000

4	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	T.R. Barat	100	12.997.653.290			100	17.837.021.785
4	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Iuran / Asuransi Bagi ASN Perangkat Daerah	T.R. Barat	12	11.883.329.800	DAU		12	16.296.141.785
4	01	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Honorarium ASN Perangkat Daerah	T.R. Barat	12	681.094.500	DAU		12	509.850.000
4	01	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ Yang Di Verifikasi Selama Setahun	T.R. Barat	144	114.610.490	DAU		144	283.250.000
4	01	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi Pada Instansi Terkait	T.R. Barat	72	139.640.000	DAU		72	226.600.000
4	01	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan perangkat Daerah Yang Tersusun	T.R. Barat	1	41.480.000	DAU		1	169.950.000
4	01	01	202	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa	T.R. Barat	3	40.000.000	DAU		3	56.650.000
4	01	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semester Perangkat Daerah Yang Tersusun	T.R. Barat	3	97.498.500	DAU		3	294.580.000
4	01	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	T.R. Barat	100	422.302.000			100	453.200.000
4	01	01	203	01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah Yang Tersusun	T.R. Barat	3	422.302.000	DAU		3	453.200.000
4	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	T.R. Barat	100	22.125.000			100	84.975.000
4	01	01	205	06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	T.R. Barat	1	22.125.000	DAU		1	84.975.000
4	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	T.R. Barat	100	4.882.023.970			100	10.140.350.000
4	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	T.R. Barat	4	187.237.000	DAU		4	453.200.000

4	01	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket penyediaan Alat tulis Kantor (ATK) Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Rencana Kebutuhan	T.R. Barat	5	87.001.970	DAU		5	113.300.000
4	01	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	T.R. Barat	5	1.051.760.000	DAU		5	2.266.000.000
4	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Kebutuhan	T.R. Barat	2	80.901.000	DAU		2	113.300.000
4	01	01	206	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Pejabat Daerah Yang Di Fasilitas	T.R. Barat	36	1.361.340.000	DAU		36	6.798.000.000
4	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah yang diikuti oleh Aparat Perangkat Daerah	T.R. Barat	135	2.113.784.000	DAU		135	396.550.000
4	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan	T.R. Barat	100	42.944.950			100	4.312.800.000
4	01	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Rencana Kebutuhan	T.R. Barat	0	-	DAU		0	2.500.000.000
4	01	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebeluer Kantor Sesuai Rencana Kebutuhan	T.R. Barat	2	19.996.000	DAU		2	453.200.000
4	01	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sesuai Rencana Kebutuhan	T.R. Barat	6	22.948.950	DAU		6	1.359.600.000
4	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	T.R. Barat	100	2.683.278.660			100	3.208.850.000
4	01	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengadministrasian Surat Masuk dan Keluar yang di Kelola dan distribusikan	T.R. Barat	4000	72.325.860	DAU		4000	226.600.000
4	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (Telepon/faximile, Internet dan tv) Sesuai Rencana Kebutuhan	T.R. Barat	24	211.770.000	DAU		24	283.250.000

4	01	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Sesuai Rencana Kebutuhan	T.R. Barat	0	-	DAU		0	-
4	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Tenaga Administrasi Dan Jasa Pembersihan Kantor	T.R. Barat	108	2.399.182.800	DAU		108	2.699.000.000
4	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	T.R. Barat	100	2.583.583.885			100	5.590.119.000
4	01	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	T.R. Barat	13	958.080.750	DAU		13	1.699.500.000
4	01	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	T.R. Barat	45	971.194.460	DAU		45	1.802.500.000
4	01	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sesuai Rencana Kebutuhan	T.R. Barat	13	108.900.000	DAU		13	162.019.000
4	01	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai rencana Kebutuhan	T.R. Barat	6	545.408.675	DAU		6	1.926.100.000
4	01	01	211		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	T.R. Barat	100	1.309.877.875			100	3.455.650.000
4	01	01	211	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH Per Bulan	T.R. Barat	12	181.103.440	DAU		12	226.600.000
4	01	01	211	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pasang Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya KDH dan WKDH	T.R. Barat	74	184.000.000	DAU		74	396.550.000
4	01	01	211	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Medical Check Up Untuk KDH dan WKDH	T.R. Barat	4	145.700.000	DAU		4	226.600.000
4	01	01	211	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Realisasi Pembayaran Dana Penunjang Operational KDH dan WKDH Per Bulan	T.R. Barat	12	799.074.435	DAU		12	2.605.900.000
4	01	01	212		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerumahtanggaan	T.R. Barat	100	1.275.410.000			100	2.039.400.000

						<i>Sekretariat Daerah</i>							
4	01	01	212	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	T.R. Barat	4	534.000.000	DAU		4	623.150.000
4	01	01	212	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	T.R. Barat	4	405.410.000	DAU		4	453.200.000
4	01	01	212	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	T.R. Barat	4	336.000.000	DAU		4	963.050.000
4	01	01	213		<i>Penataan Organisasi</i>	<i>Persentase Realisasi Penataan Administrasi Kelembagaan Pemda</i>	<i>T.R. Barat</i>	<i>100</i>	<i>1.122.972.040</i>			<i>100</i>	<i>2.711.630.000</i>
4	01	01	213	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	T.R. Barat	2	165.338.890	DAU		2	255.380.000
4	01	01	213	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	T.R. Barat	3	375.838.050	DAU		3	879.250.000
4	01	01	213	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	T.R. Barat	1	121.661.150	DAU		1	927.000.000
4	01	01	213	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Kegiatan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	T.R. Barat	1	109.247.100	DAU		1	325.000.000
4	01	01	213	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	T.R. Barat	2	350.886.850	DAU		2	325.000.000
4	01	01	214		<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	<i>T.R. Barat</i>	<i>100</i>	<i>1.002.633.750</i>			<i>100</i>	<i>2.413.290.000</i>
4	01	01	214	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan Keprotokolan	T.R. Barat	60	432.140.000	DAU		60	736.450.000
4	01	01	214	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Pelayanan Komunikasi Pimpinan, Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan	T.R. Barat	20	112.727.750	DAU		20	827.090.000
4	01	01	214	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Penyediaan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Yang Tersusun	T.R. Barat	12	457.766.000	DAU		12	849.750.000

4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan Bahan Perumusan, Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas, Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Dibidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.	T.R. Barat	100	9.273.494.400			100	16.715.500.000
4	01	02	201		<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>	<i>Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan</i>	<i>T.R. Barat</i>	<i>100</i>	<i>751.084.800</i>			<i>100</i>	<i>1.359.600.000</i>
4	01	02	201	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Administrasi Pemerintahan yang Tersusun	T.R. Barat	4	121.784.800	DAU		4	192.610.000
4	01	02	201	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Administrasi Kewilayahan Yang Tersusun	T.R. Barat	3	264.000.000	DAU		3	453.200.000
4	01	02	201	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Otonomi Daerah Yang Tersusun	T.R. Barat	4	365.300.000	DAU		4	713.790.000
4	01	02	202		<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>Persentase Terlaksanannya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>T.R. Barat</i>	<i>100</i>	<i>6.819.679.400</i>			<i>100</i>	<i>12.988.915.000</i>
4	01	02	202	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan	T.R. Barat	8	6.606.179.400	DAU		8	12.700.000.000
						Jumlah Calon Jemaah Haji yang di Fasilitasi	T.R. Barat	1		DAU		1	
						Jumlah Dokumen Kegiatan Penyaluran Dana Hibah	T.R. Barat	950		DAU		950	
4	01	02	202	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kebijakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta capaian kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	T.R. Barat	1	126.830.000	DAU		1	198.275.000
4	01	02	202	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kebijakan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan serta Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	T.R. Barat	5	86.670.000	DAU		5	90.640.000
4	01	02	203		<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	<i>Persentase Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah</i>	<i>T.R. Barat</i>	<i>100</i>	<i>1.295.554.850</i>			<i>100</i>	<i>1.857.135.000</i>
4	01	02	203	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Forum Kajian Perundang - Undangan dan Produk Hukum Yang Tersusun	T.R. Barat	37	393.911.550	DAU		37	566.500.000
4	01	02	203	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Renca Aksi Nasional Hak	T.R. Barat	4		DAU		4	815.760.000

					Asasi Manusia			670.308.700				
					Jumlah Permasalahan Hukum Yang terselesaikan	T.R. Barat	15		DAU		15	
4	01	02	203	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	T.R. Barat	1		DAU	1	
						Jumlah Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Tersedia	T.R. Barat	37	231.334.600	DAU	37	474.875.000
4	01	02	204		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Perjanjian Kerjasama Daerah Yang Terlaksana	T.R. Barat	100	407.175.350		100	509.850.000
4	01	02	204	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kegiatan Kerjasama antar Daerah dan Instansi Pemerintah (MOU/PKS)	T.R. Barat	7	142.518.000	DAU	7	186.945.000
4	01	02	204	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Luar Negeri (MOU/PKS)	T.R. Barat	10	138.658.000	DAU	10	186.945.000
4	01	02	204	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Kerjasama Daerah	T.R. Barat	1	125.999.350	DAU	1	135.960.000
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Ketersediaan Bahan Perumusan Pengoordinasi Pelaksanaan Tugas, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan.	T.R. Barat	100	2.118.920.200		100	4.982.960.351
4	01	03	201		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	T.R. Barat	100	684.074.600		100	1.911.399.790
4	01	03	201	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Laporan Pembinaan BUMD dan BULD Yang Dilaksanakan	T.R. Barat	3	100.000.000	DAU	3	420.699.895
4	01	03	201	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan TPID Yang Di Hasilkan	T.R. Barat	1	245.096.200	DAU	1	420.699.895
						Jumlah Laporan Pengelolaan DBH-CHT	T.R. Barat	2		DBH-CHT	2	
4	01	03	201	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Laporan TPKAD yang Dihasilkan	T.R. Barat	4	138.978.400	DAU	4	520.000.000
4	01	03	201	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Adminisrasi Penerapan BLUD Yang Diverifikasi	T.R. Barat	5	200.000.000	DAU	5	550.000.000

4	01	03	202		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	T.R. Barat	100	374.878.400			100	734.603.161
4	01	03	202	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Informasi Administrasi Pembangunan Daerah dan Realisasi Pembangunan	T.R. Barat	2	104.000.000	DAU		2	163.909.050
4	01	03	202	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di Tahun Berjalan	T.R. Barat	1	159.200.000	DAU		1	258.153.755
4	01	03	202	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah yang Bersumber dari (APBD Kab. APBD Prov, APBN dan DAK)	T.R. Barat	1	111.678.400	DAU		1	312.540.356
4	01	03	203		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	T.R. Barat	60	662.176.700			60	1.144.330.000
4	01	03	203	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang terlaksana	T.R. Barat	550	186.400.400	DAU		550	237.930.000
4	01	03	203	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah fasilitasi OPD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik	T.R. Barat	66	184.505.700	DAU		66	283.250.000
4	01	03	203	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Kematangan UKPBJ	T.R. Barat	7	291.270.600	DAU		7	623.150.000
4	01	03	204		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Ketersediaan Data Informasi Sumber Daya Alam	T.R. Barat	100	397.790.500			100	1.192.627.400
4	01	03	204	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Potensi Suber Daya Alam Di Kab. Bone	T.R. Barat	2	147.733.000	DAU		2	455.126.100
4	01	03	204	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Monitoring Potensi Sumber Daya Alam di Kab. Bone	T.R. Barat	1	83.837.300	DAU		1	537.876.300
4	01	03	204	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah koordinasi Antar Instansi Yang Terkait	T.R. Barat	4	166.220.200	DAU		4	199.625.000
						Jumlah Laporan Pengelolaan DBH-CHT	T.R. Barat	1		DBH-CHT		1	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja SKPD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis kedalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur, yang selanjutnya akan dikompilasikan ditingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bone.

Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah. Meskipun perlu kami sampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif. Artinya, dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Dengan penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan semua pihak memiliki satu persepsi tentang Rencana Kerja sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

W. atamp one, Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE



Drs. H. A. D. ISLAMUDDIN
Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP. 19671006 1993 1 010